



Monev Rencana Aksi Triwulan I - III Tahun 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak Telp. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

Nomor : 13/KPN/UND.PW1.2/IV/2025 Demak, 15 April 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi
Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

Yth. Para pejabat/pegawai pada daftar terlampir.
di Pengadilan Negeri Demak

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional, Staf/Pelaksana dan CPNS Pengadilan Negeri Demak untuk menghadiri undangan tersebut diatas, yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Rabu, 16 April 2026
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Aula Pengadilan Negeri Demak
acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi SAKIP
Triwulan I Tahun 2025 Pengadilan Negeri
Demak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat waktu.



Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Muhamad Fauzan Haryadi

Lampiran Surat Undangan
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Nomor : /KPN/UND.PW1.2/IV/2025
Tanggal : 15 April 2025

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Hakim, Pengadilan Negeri Demak;
2. Panitera, Pengadilan Negeri Demak;
3. Sekretaris, Pengadilan Negeri Demak;
4. Panitera Muda, Pengadilan Negeri Demak;
5. Kepala Sub Bagian, Pengadilan Negeri Demak;
6. Jabatan Fungsional, Pengadilan Negeri Demak;
7. Staf/Pelaksana, Pengadilan Negeri Demak; dan
8. CPNS, Pengadilan Negeri Demak



Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Muhamad Fauzan Haryadi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Nomor : 13/KPN/UND.PW1/IV/2025 perihal
Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I
Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 April 2025
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Aula Pengadilan Negeri Demak
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan
I Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Peserta Rapat :

1. Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
2. Niken Rochayati, S.H.,M.H.
3. Obaja David J.H. Sitorus, S.H.
4. Dian Arimbi, S.H., M.H.
5. Puji Sulaksono, S.H.,M.H.
6. Ismail, S.H., M.H.
7. Ngabdul Ngayis, S.H.
8. Anom Sunarso, S.H.
9. Yogi Prasetiono, S.E.,S.H.,M.H.
10. Subiyono
11. Abik Ifawan, A.Md.
12. Budy Haryanto, A.Md, S.H.
13. Visuddhatma Sankara, S.Kom.
14. Suhartini.
15. Radiantika E.W, A.Md
16. Sri Mukayanah, S.H.
17. Vina Amelia Virgonita.
18. Sahesti Ningtyas, A.Md
19. Diah Retno Budijaningsih, S.H.
20. Agung Setiyaji
21. M.Luthfi Said, S.H.
22. Albima Sakti, S.H.
23. Akhyar Fauzan, S.H.
24. Syahdin Alamsyah, S.H.
25. Luhur Sanitya P, S.H.
26. Lina Dwi I, S.H.
27. Ulfa Alqofiyah, S,H....

27. Ulfa Alqofiyah, S.H.
28. Nurul HS, S.H.
29. Ray Sepriadi, S.H.
30. Aditya D, S.H.
31. Indah Wulandari, S.H.
32. Nofretari, S.H.I.
33. Meitha Suryani Rafinda, S.H .
34. Riska Adi W
35. Ngari
36. Rengga
37. Darwanto
38. Yahya Arif
39. M.Muntoha
40. Samsul Komarudin

Jalannya rapat :

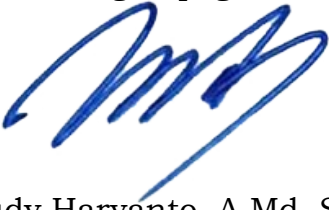
Pengarahan umum pimpinan rapat dari Ketua Pengadilan Negeri Demak:

1. Target Sasaran/Program Kegiatan Tri Wulan I Tahun 2025 yang tidak terpenuhi akan diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2025

Mengetahui,

Kasub Bag Kepegawaian & Ortala

Ketua Pengadilan Negeri Demak,


Budy Haryanto, A.Md, SH
NIP. 197704072009041004


Muhamad Fauzan Haryadi, SH., MH.
NIP. 197802152001121002





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Fauzan H	Ketua	
2.	Mber R.	Wakil Ketua	
3.	Obaja Sitorus	Hakim	
4.	Dwi Rance	Hakim	
5.	H. Abdul Wahyis	panmud pidana	
6.	Yosep P	Panmud Teler	
7.	Brom Sunarto	Panmud pidana	
8.	Subyono	Katubag KIP	
9.	Achyar Fauzan	Cakim	
10.	Luhur Smitya P	Cakim	
11.	Ray septiadi	cakim	
12.	Aditya Darmawan	cakim	
13.	Albina Sakti	cakim	
14.	Abik Hawan	Kasubag Umumstet	
15.	Vlud	Mokam	
16.	Samsul h	Honores	
17.	Risto Adi W	Honorer	
18.	M. Muntoha	Honorer	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

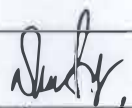
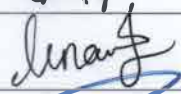
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
19.	Ngah	Honorar	
20.	Remy Hardy S	Honorar	
21.	Dim Wulandari	Honorar	
22.	Meitna S.P	Staf	
23.	YAHYA ORUF	Honorar	
24.	M Luthfi S	Cakun	
25.	Syahdli A	Cakun	
26.	Indah wulandari	Staf	
27.	Vina Amalia V.	JSP	
28.	Agung Setiyaji	Jurusita	
29.	Nurul Annisaq	pic APBN	
30.	Sri Hartoanah	Pp	
31.	ULFA ALQOFIYAH	Jurusita	
32.	Diah Retno	JSP	
33.	Guharti'ni	ti	
34.	Radiantifa endang W.	Staf	
35.	Nopretari	Staf	
36.	Dian Arimbi	Hakim	



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
37.	Nur H. S	Cakim	
38.	Lina D. I	Cakim	
39.	Puji Sulakom	Clerkus	
40.	Burail	Amir	
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
56.			
57.			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI ATAS
RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2025 BERDASARKAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**



FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi TI 2025		Capaian TI 2025
						%	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu					
		Pidana	100	89	89	100	100
		Perdata	93	72	72	100	108
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0	0	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding					
		Pidana	89	64	52	81	91
		Perdata	92	18	14	78	85
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan					

		upaya hukum kasasi					
		Pidana	95	64	58	91	95
		Perdata	97	18	13	72	74
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97	95	95	100	103
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	161	161	100	102
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	12	0	0	0
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	0	0	0	0	0

		diluar gedung pengadilan					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	59	59	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	1	3	300	333

DATA KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW 1	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Perdata Gugatan	17	17	0	100 %	93 %	108 %
2	Perdata Permohonan	43	43	0			
3	Gugatan Sederhana	11	11	0			
4	Perlawanan/Bantahan	1	1	0			
Jumlah		72	72	0			

Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW 1	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	60	60	0	100 %	93 %	108 %
2	Pidana Singkat	0	0	0			
3	Pidana Cepat	24	24	0			
4	Pidana Anak	4	4	0			
5	Pidana Praperadilan	1	1	0			
Jumlah		89	89				

b. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 2025

Catatan:

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan untuk restorative	Perkara diselesaikan dengan restorative	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa/Khusus	0	0	0	0	0
Jumlah						

c. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW 1	Tidak mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	17	14			
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	1				
Jumlah		18	14	92	78	85
	Pidana					
1	Pidana Biasa	60	50			
2	Pidana Anak	4	2			
Jumlah		64	52	89	81	91

d. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW 1	Tidak mengajukan kasasi	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	17	13			
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	1				
Jumlah		18	13	97	72	74
	Pidana					
1	Pidana Biasa	60	56			
2	Pidana Anak	4	2			
Jumlah		64	58	95	91	95

e. Perkara Pidana Anak

Catatan:

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
	Pidana					
1	Pidana Anak	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan 1

No	Target	Indek IKM
1	97	95

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Pengiriman salinan putusan tepat waktu

Catatan:

- Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak
- SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
- Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan keseluruhan yang dikirim	Jumlah Salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara Pidana	89	89	98 %	100 %	102 %
2	Perkara Perdata	72	72			
Jumlah		161	161			

b. Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian Tahun 2025

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). **Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil**
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

No	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi (Mediasi Berhasil)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	12	0	0	0	0

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

No	Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo	Jumlah perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

No	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

c. Posbakum

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum

No	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	59	59	100	100	100

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 2024

Catatan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : berkekuatan hukum tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

No	Jumlah permohonan eksekusi	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	1	2	90	300	333



Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

Nomor : 86.../KPN/UND.PW1/VI/2025 Demak, 24 Juni 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Undangan Rapat Reviu Evaluasi Kinerja Triwulan II
pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Yth. Para pejabat/pegawai pada daftar terlampir.
di Pengadilan Negeri Demak

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Demak untuk menghadiri undangan tersebut diatas, yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
tempat : Aula Pengadilan Negeri Demak
acara : Rapat Reviu Evaluasi Kinerja Triwulan II
pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat waktu.

Ketua Pengadilan Negeri Demak,

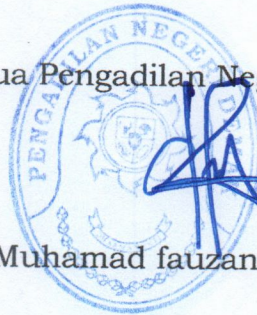
Muhamad fauzan Haryadi

Lampiran Surat Undangan
Ketua Pengadilan Negeri Demak
Nomor : 92./KPN/ UND.PW1/VI/2025
Tanggal : 24 Juni 2025

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Wakil Ketua, Pengadilan Negeri Demak
2. Hakim Pengawas Bidang, Pengadilan Negeri Demak
3. Panitera, Pengadilan Negeri Demak
4. Sekretaris, Pengadilan Negeri Demak
5. Panitera Muda, Pengadilan Negeri Demak
6. Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri Demak
7. Jurusita, Pengadilan Negeri Demak
8. Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Demak

Ketua Pengadilan Negeri Demak,



Muhamad fauzan Haryadi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**NOTULEN RAPAT
RAPAT REVIU EVALUASI KINERJA TRIWULAN II
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

Dasar : Surat Undangan Nomor : 83/KPN/UND.PW1/VI/2025
perihal Undangan Rapat Reviu Evaluasi Kinerja Triwulan II
Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Aula Pengadilan Negeri Demak
Acara : Rapat Reviu Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada
Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Peserta Rapat :

1. Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
2. Niken Rochayati, S.H., M.H.
3. Obaja David J.H. Sitorus, S.H.
4. Ahmad Syairozi, S.H.
5. Puji Sulaksono, S.H., M.H.
6. Ismail, S.H., M.H.
7. Ngabdul Ngayis, S.H.
8. Anom Sunarso, S.H.
9. Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H.
10. Subiyono
11. Abik Ifawan, A.Md.
12. Budy Haryanto, A.Md, S.H.
13. Visuddhatma Sankara, S.Kom.
14. Suhartini.
15. Radiantika E.W, A.Md
16. Sri Mukayanah, S.H.
17. Vina Amelia Virgonita.
18. Sahesti Ningtyas, A.Md
19. Diah Retno Budijaningsih, S.H.
20. Agung Setiyaji
21. Ulfa Alqofiyah, S.H.
22. Nurul Annisa, S.E.
23. Indah Wulandari, S.H.
24. Nofretari, S.H.I.
25. Meitha Suryani Rafinda, S.H .
26. Lisnawati, A.Md
27. Puji Wisnu Utomo, S.T.
28. Riska Adi W
29. Ngari
30. Rengga
31. Darwanto
32. Yahya Arif
33. M.Muntoha
34. Samsul Komarudin

Jalannya rapat :

Pengarahan umum pimpinan rapat dari Ketua Pengadilan Negeri Demak. Kegiatan rapat bertujuan untuk melakukan pembahasan Reviu Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB

Pembahasan:**Kasubag PTIP, Subiyono :**

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan data SIPP pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB diperoleh capaian kinerja yang belum memenuhi target adalah sebagai berikut :

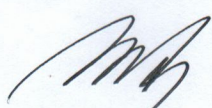
1. Presentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu kurang 12,5 %
2. Presentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu kurang 1,49 %
3. Presentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu kurang 18,9 %
4. Presentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi belum memenuhi target dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 yaitu kurang 1,88 %
5. Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) yaitu 40,62 % dengan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi pada Tahun 2025 berjumlah 4 perkara dari 9 perkara.

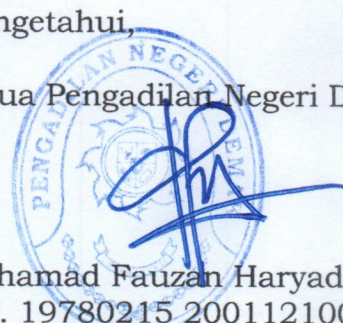
Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak : Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,M.H. dengan menyampaikan diharapkan presentase atau capaian Kinerja pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang belum memenuhi target dapat meningkat sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja pada masing-masing bagian serta menaati disiplin dalam bekerja sesuai SOP yang berlaku, Kebijakan Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,

Kasub Bag Kepegawaian & Ortala,

Ketua Pengadilan Negeri Demak,


Budy Haryanto, A.Md, S.H.
NIP. 197704072009041004


Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19780215 2001121002.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU EVALUASI KINERJA TRIWULAN II
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
25 JUNI 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20.	Lirawati	Staf	
21.	Maria RMP	PPNPN	
22.	Ngah	PPNPN	
23.	Wurungto	PPNPN	
24.	Ryqz	PPNPN	
25.	Kamal	PPNPN	
26.	Mr. Mardiana	PPNPN	
27.	Ulschoten	Staf	
28.	Samirul L	PPNPN	
29.	Yogis	Panmud Hekam	
30.	Agung Setiyaji	Junista	
31.	Abik Irawan	Kasub umum ete	
32.	Abdullah Ageng	Panmud Prdola	
33.	Anom Sunarto	Panmud Ridana	
34.	Budy H	Kasub KOR	
35.			



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU EVALUASI KINERJA TRIWULAN II
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
25 JUNI 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M Farzan H	KPA	
2.	Nlben - R	Waka PR	
3.	Obaja Setoro S	Hakim	
4.	Ahmad Syarif	Hakim	
5.	Dwi Florence	Hakim	
6.	Imail	Samudra	
7.	Puji Sulaksana	Sekretaris	
8.	Subyomo	Kasubog PRP	
9.	Sri Lukmananah	PP	
10.	Purhastini	PP	
11.	Diah Retno B	JSP	
12.	ULFA ALAOFIYAH	Jurusita	
13.	Indah wulandari	staf	
14.	Huril Annisa	pu ABM	
15.	Radiautika E.W.	staf	
16.	Uk Ode Ngy Carl	PP	
17.	Vina Amalia V.	JSP	
18.	Meitha S-R	staf	
19.	Nopretari	staf	



FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi TII 2025		Capaian TII 2025
						%	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu					
		Pidana	100	48	48	100	100
		Perdata	93	50	50	100	108
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0	0	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding					
		Pidana	89	44	33	75	84
		Perdata	92	19	13	68	74
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan					

		upaya hukum kasasi					
		Pidana	95	44	38	86	91
		Perdata	97	19	15	79	81
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97	99	99	100	103
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	98	98	100	102
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	15	1	7	133
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	0	0	0	0	0

		diluar gedung pengadilan					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	39	39	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	8	1	13	14

DATA KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW II	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Perdata Gugatan	18	18	0	100 %	93 %	108 %
2	Perdata Permohonan	20	20	0			
3	Gugatan Sederhana	11	11	0			
4	Perlawanan/Bantahan	1	1	0			
Jumlah		50	50	0			

Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW II	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	44	44	0	100 %	100 %	100 %
2	Pidana Singkat	0	0	0			
3	Pidana Cepat	4	4	0			
4	Pidana Anak	0	0	0			
5	Pidana Praperadilan	0	0	0			
Jumlah		48	48				

b. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 2025

Catatan:

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan untuk restorative	Perkara diselesaikan dengan restorative	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa/Khusus	0	0	0	0	0
Jumlah						

c. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW II	Tidak mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	18	13			
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	1	0			
Jumlah		19	13	92	68	74
	Pidana					
1	Pidana Biasa	44	33			
2	Pidana Anak	0	0			
Jumlah		44	33	89	75	84

d. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW II	Tidak mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	18	14			
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	1	1			
Jumlah		19	15	97	79	81
	Pidana					
1	Pidana Biasa	44	38			
2	Pidana Anak	0	0			
Jumlah		44	38	95	86	91

e. Perkara Pidana Anak

Catatan:

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
	Pidana					
1	Pidana Anak	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan 1

No	Target	Indek IKM
1	97	99

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Pengiriman salinan putusan tepat waktu

Catatan:

- Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak
- SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasasn Perkara
- Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan keseluruhan yang dikirim	Jumlah Salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara Pidana	48	48	98 %	100 %	102 %
2	Perkara Perdata	50	50			
Jumlah		98	98			

b. Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian Tahun 2025

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). **Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil**
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

No	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi (Mediasi Berhasil)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	15	1	5	7	133

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

No	Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo	Jumlah perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

No	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

c. Posbakum

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum

No	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	39	39	100	100	100

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 2025

Catatan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : berkekuatan hukum tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

No	Jumlah permohonan eksekusi	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	8	1	90	13	14



Monev Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK



PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak



(0291) 658 771



pengadilannegeridemak@gmail.com



www.pn-demak.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

Nomor : ...60.../WKPN/UND.OT1.6/XII/2025 Demak, 01 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Undangan Rapat Monev Triwulan III
Capaian SAKIP Pengadilan Negeri Demak

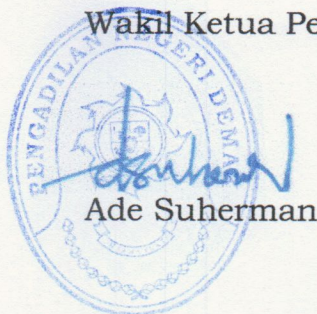
Yth. Para pejabat/pegawai pada daftar terlampir.
di Pengadilan Negeri Demak

Bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional dan Staf/Pelaksana Pengadilan Negeri Demak untuk menghadiri undangan tersebut diatas, yang akan dilaksanakan:

pada hari, tanggal : Selasa, 2 Desember 2025
waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Demak
acara : Rapat Monev Triwulan III Capaian SAKIP
Pengadilan Negeri Demak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat waktu.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak,

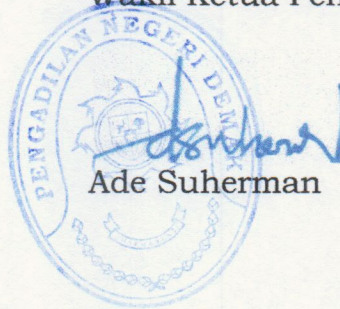

Ade Suherman

Lampiran Surat Undangan
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak
Nomor : 60/WKPN/UND.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Panitera, Pengadilan Negeri Demak;
2. Sekretaris, Pengadilan Negeri Demak;
3. Panitera Muda, Pengadilan Negeri Demak;
4. Kepala Sub Bagian, Pengadilan Negeri Demak;
5. Operator SAKIP Pengadilan Negeri Demak

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Nomor : 60/KPN/UND.OT1.6/XII/2025
perihal Monev Triwulan III Capaian SAKIP Pengadilan
Negeri Demak

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Desember 2025

Pukul : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Aula Pengadilan Negeri Demak

Acara : Monev Triwulan III Capaian SAKIP Pengadilan Negeri
Demak

Peserta Rapat : 1. Ade Suherman, S.H.,M.H.
2. Ismail, S.H.,M.H.
3. Puji Sulaksono, S.H.,M.H.
4. Ngabdul Ngayis, S.H.
5. Anom Sunarso, S.H.
6. Yogi Prasentiono, S.E.,S.H.,M.H.
7. Subiyono
8. Budy Haryanto, A.Md., S.H.
9. Abik Ifawan, A.Md.
10. Visuddhatma Sankara, S.Kom.
11. Ainul Kamal, S.Kom.

Jalannya Acara :

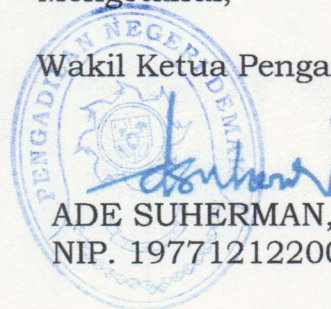
- Pembukaan dan pengarahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak, Bapak Ade Suherman, S.H.,M.H.,
- Untuk Target yang tidak memenuhi akan dilakukan revidi seperti :
 1. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding
 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi
 3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 4. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).Dokumen terlampir.

Mengetahui,

Kasub Bag Kepegawaian & Ortala,

BUDY HARYANTO, A.Md, S.H.
NIP. 197704072009041004

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak,



ADE SUHERMAN, S.H.,M.H.
NIP. 197712122002121005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

**DOKUMENTASI MONEV TRIWULAN III CAPAIAN SAKIP
PENGADILAN NEGERI DEMAK**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI DEMAK

JL. Sultan Trenggono No. 27 Demak TELP. (0291) 685771, FAX. (0291) 686100
www.pn-demak.go.id, E-mail : pengadilannegeridemak@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT MONEV TRIWULAN III CAPAIAN SAKIP
PENGADILAN NEGERI DEMAK

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Puji Sulaksana	Sekretaris	
2.	Ade Suherman	wk pn	
3.	Ikmail	Panitera	
4.	Subyong	Katib PP	
5.	Abik Kawan	Kasub Yaman & ko	
6.	Hgabsul Abgays	Panmua Hukum	
7.	Yogi P	Panmud Pidana	
8.	Sudy H	Kasub KOR	
9.	Anom Sunarno	Panmud Pidana	
10.	Visud	Insan	
11.	Amul Kama	PPK	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

FORM PENGUMPULAN DATA KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEMAK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi TIII 2025		Capaian TIII 2025	Keterangan
						%	%	
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu						
		Pidana	100	274	274	100	100	
		Perdata	93	177	177	100	108	
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0	0	0	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding						
		Pidana	89	203	147	72	81	Dibawah target
		Perdata	92	65	44	72	79	Dibawah target

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi						
		Pidana	95	203	169	83	88	Dibawah target
		Perdata	97	65	50	77	79	Dibawah target
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97	97,41	97,41	100	103	
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98	451	451	100	102	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	43	4	9	93	Capain Tidak 100 %
3	Meningkatnya akses	a. Persentase perkara prodeo	0	0	0	0	0	

	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang diselesaikan						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0	
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	164	164	100	100	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	9	5	56	62	Dibawah target

DATA KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW III	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Perdata Gugatan	62	62	0	100 %	93 %	108 %
2	Perdata Permohonan	80	80	0			
3	Gugatan Sederhana	32	32	0			

4	Perlawanan/Bantahan	3	3	0			
Jumlah		177	177	0			

Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW III	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	197	197	0	100 %	100 %	100 %
2	Pidana Singkat	0	0	0			
3	Pidana Cepat	70	70	0			
4	Pidana Anak	6	6	0			
5	Pidana Praperadilan	1	1	0			
Jumlah		274	274				

b. Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 2025

Catatan:

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan untuk restorative	Perkara diselesaikan dengan restorative	Realisasi	Target	Capaian
----	---------------	------------------------------------	---	-----------	--------	---------

1	Pidana Biasa/Khusus	0	0	0	0	0
Jumlah						

c. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW III	Tidak mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	62	45	92	72	79
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	3	2			
Jumlah		65	47			
	Pidana					
1	Pidana Biasa	197	145	89	72	81
2	Pidana Anak	6	2			
Jumlah		203	147			

d. Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata

Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Putus TW III	Tidak mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
	Perdata					
1	Gugatan	62	48	97	77	79
2	Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	3	2			
	Jumlah	65	50			
	Pidana					
1	Pidana Biasa	197	167	95	83	88
2	Pidana Anak	6	2			
	Jumlah	203	169			

e. Perkara Pidana Anak

Catatan:

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian
	Pidana					
1	Pidana Anak	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
- Nilai Persepsi minimal 3,6
≥ 80

No	Target	Indek IKM
1	97	97,41

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Penyelenggara

dengan nilai konversi interval IKM Index harus

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Triwulan 1

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Pengiriman salinan putusan tepat waktu

Catatan:

- Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak
- SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

No	Jenis Perkara	Jumlah Putusan keseluruhan yang dikirim	Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
----	---------------	---	--	--------	-----------	---------

1	Perkara Pidana	274	274	98 %	100 %	102 %
2	Perkara Perdata	117	117			
Jumlah		451	451			

b. Mediasi yang Menjadi Akta Perdamaian Tahun 2025

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). **Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil**
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

No	Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi (Mediasi Berhasil)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	43	4	10	9	93

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan :

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

No	Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo	Jumlah perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

No	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	0	0	0	0	0

c. Posbakum

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum

No	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	164	164	100	100	100

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 2025

Catatan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : berkekuatan hukum tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

No	Jumlah permohonan eksekusi	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	90	9	5	56	62